

BALÁZS KÁNTÁS

**PERAK MALAYSIA
NEGARA BERSENGAJA
MENGELUARKAN
PERANGKO
1878-1941**



Penyusun katalog perangkat elektronik:

Dr. Balázs Kántás PhD

ISBN 978-615-7015-13-5

Penerbit yang bertanggung jawab:

Dr. Zoltán Zsávolya PhD

HUNGARICA ELECTRONICA
BUDAPEST, 2025

GARIS BESAR SEJARAH DAN FILATELI NEGARA PERAK DARI AWAL TAHUN 1800-AN SAMPAI AKHIR PERANG DUNIA II

Perak adalah salah satu negara bagian terbesar di Malaysia saat ini. Luasnya 21.035 km², dengan populasi 2,3 juta jiwa. Pada awal abad ke-19, Perak adalah salah satu negara bagian terkaya dan terpenting di Semenanjung Malaya, terutama karena cadangan timah yang melimpah. Perdagangan timah tidak hanya menjadi sumber kemakmuran ekonomi, tetapi juga menarik perhatian negara-negara tetangga dan kelompok kepentingan asing. Namun, kekuasaan sultan Perak sering kali hanya

bersifat formal, karena para bangsawan lokal, kepala suku, dan komunitas perdagangan – terutama klan penambang Tionghoa – memiliki pengaruh yang signifikan terhadap urusan negara. Sejak awal abad ke-19, pengaruh Johor, Sami, dan Belanda semakin terasa, tetapi Perak pada dasarnya mempertahankan kemerdekaannya hingga intervensi Inggris.

Pada pertengahan abad ke-19, ketegangan internal yang parah meletus di Perak. Persaingan untuk menguasai tambang timah menyebabkan bentrokan kekerasan antara elit penguasa Melayu dan perkumpulan rahasia Tionghoa yang pada dasarnya beroperasi berdasarkan kepentingan bisnis – Ghee Hin dan Hai San. Situasi ini diperumit oleh fakta bahwa masalah suksesi tahta sultan belum

diselesaikan, sehingga krisis dinasti dan pertikaian internal di antara anggota keluarga penguasa sering terjadi. Pada tahun 1860-an dan 1870-an, konflik internal ini menyebabkan perang saudara di negara Malaysia, yang mengganggu stabilitas negara dan membuka jalan bagi intervensi Inggris dan penegakan kepentingan kolonial.

Titik balik yang menentukan terjadi pada tahun 1874 dengan ditandatanganinya Perjanjian Pangkor, di mana pemerintah Inggris mengakui hak Sultan Abdullah Perak atas tahta, dengan imbalan ia menerima penunjukan residen Inggris. Inggris pada dasarnya menjajah negara tersebut, meskipun secara formal negara tersebut tetap merdeka. Hal ini menandai dimulainya era protektorat Inggris di

Perak, yang dengan cepat menjadi model bagi integrasi kolonial negara-negara Melayu lainnya. Reformasi yang dilakukan oleh residen Inggris pertama di Perak, J. W. W. Birch, yaitu perubahan sistem perpajakan dan administrasi lokal, menimbulkan perlawanan sengit yang berujung pada pembunuhan Birch yang terkenal pada tahun 1875. Residen tersebut dibunuh oleh pemberontak Melayu, dan sebagai balasan, Inggris mengeksekusi atau mengasingkan beberapa pemimpin Melayu. Sejak saat itu, pemerintahan Inggris secara bertahap memperkuat kekuasaannya, sementara kekuasaan sultan dan bangsawan lokal menjadi semakin formal dan seremonial.

Pada tahun 1880-an dan 1890-an, ekonomi Perak berkembang pesat. Industri

pertambangan timah berkembang pesat di wilayah tersebut dan semakin dikuasai oleh pengusaha Eropa, terutama Inggris dan Tiongkok. Administrasi kolonial Inggris melakukan investasi infrastruktur modern: mereka membangun jalur kereta api, pelabuhan, dan pusat perdagangan kota baru. Di bidang pertanian, perkebunan karet berkembang pesat, yang membutuhkan banyak pekerja kontrak dari India. Masyarakat menjadi beragam secara etnis: selain penduduk desa Melayu, para penambang dan pedagang Tionghoa, serta pekerja perkebunan India juga memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi negara.

Pada tahun 1896, Perak bergabung dengan persekutuan negara kolonial Inggris

bernama Federated Malay States bersama dengan Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang. Melalui administrasi pusat, struktur pemerintahan Inggris menjadi lebih terpadu, dan pengaruh administratif dan ekonomi Perak semakin meningkat. Kota Ipoh, ibu kota Perak, berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di Malaysia pada masa itu. Namun, keuntungan ekonomi kolonial terutama dinikmati oleh pengusaha Eropa dan Tionghoa, sementara sebagian besar penduduk Melayu tetap tinggal di desa-desa dan hanya menikmati sedikit keuntungan dari perkembangan ekonomi.

Pada awal abad ke-20, dampak sosial dan budaya modernisasi juga muncul di Perak. Gerakan reformasi Islam, sekolah-sekolah jenis

baru, serta pertukaran gagasan yang aktif di kalangan intelektual Melayu berkontribusi pada peningkatan kesadaran politik. Selama Perang Dunia I, permintaan timah meningkat secara wajar, sehingga perekonomian Perak semakin berkembang berkat industri pertahanan. Pada tahun 1920-an, perkebunan karet mendominasi struktur ekonomi, tetapi krisis ekonomi global pada tahun 1930-an berdampak parah pada negara bagian ini: jatuhnya harga bahan baku menyebabkan pengangguran massal dan ketegangan sosial.

Selama Perang Dunia II, pada Desember 1941, Perak dengan cepat jatuh ke bawah pendudukan Jepang, sama seperti negara-negara Melayu lainnya di wilayah tersebut. Pendudukan Jepang antara tahun 1942 dan

1945 membawa perubahan dramatis: pemerintahan Inggris runtuh, dan otoritas Jepang memberlakukan kediktatoran militer di wilayah tersebut. Penduduk menghadapi kelangkaan pangan, kerja paksa, dan kebrutalan tentara pendudukan. Komunitas Tionghoa sangat menderita akibat pembalasan Jepang, sehingga banyak dari mereka bergabung dengan gerilyawan paramiliter yang dipimpin komunis bernama Tentara Rakyat Anti-Jepang Malaya (Malayan People's Anti-Japanese Army), yang juga aktif bertempur di wilayah pedalaman Perak. Bagi penduduk Melayu, kekuasaan Jepang membawa dua pengalaman: di satu sisi, kehadiran langsung otoritas Inggris di wilayah tersebut berakhir, tetapi di sisi lain, kekejaman

pendudukan membuat jelas bahwa berakhirnya masa kolonial membutuhkan solusi politik baru.

Pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah, pasukan Inggris kembali ke Perak, tetapi semua itu terjadi dalam lingkungan politik di mana gagasan kemerdekaan dan tuntutan perubahan sosial semakin kuat. Perak memainkan peran penting dalam proses kemerdekaan Melayu pada tahun-tahun pasca-perang, tetapi fondasi untuk hal ini telah diperkuat melalui intervensi Inggris pada paruh kedua abad ke-19 dan pengalaman yang diperoleh selama pendudukan Jepang.

Mengenai sejarah penerbitan prangko dan pos negara bagian Melayu Perak, pada awal abad ke-19, tidak ada layanan pos yang terorganisir di Perak. Komunikasi resmi antara

istana sultan dan para pemimpin lokal dilakukan melalui utusan atau pedagang. Hubungan perdagangan internasional - terutama dengan Penang, Singapura, dan pedagang dari koloni Inggris di India - sudah membutuhkan bentuk pengiriman dan penerimaan surat tertentu, tetapi pada saat itu belum ada sistem pos formal.

Pada tahun 1874, sebagai akibat dari Perjanjian Pangkor, Perak berada di bawah pengaruh Inggris, dan dengan demikian dimulailah pembangunan layanan pos modern. Inggris membentuk sistem pos terpadu di Semenanjung Malaya, dan Perak juga bergabung dengan jaringan ini.

Perangko pos pertama Perak diterbitkan pada tahun 1878, tetapi perangko tersebut

masih berupa perangko yang dicetak di atas perangko lama. Perangko tersebut muncul dalam berbagai warna dan didasarkan pada perangko koloni Inggris Straits Settlements (Permukiman Selat), tetapi diberi tulisan “PERAK”. Edisi pertama masih dikirim melalui kantor pos India.

Pada tahun 1896, Perak secara resmi bergabung dengan Federated Malay States (FMS), yang menggabungkan sistem pos negara bagian dengan wilayah Selangor, Pahang, dan Negeri Sembilan. Akibatnya, penerbitan perangko lokal untuk sementara waktu terhenti. Prangko-prangko ini tetap digunakan dalam waktu yang sangat lama.

Mulai tahun 1900, Perak juga menggunakan prangko tipe umum Federated

Malay States, kebanyakan dengan tulisan PERAK, yang menampilkan simbol resmi federasi, seperti harimau Malaya. Perangko ini tersebar luas dan digunakan oleh kantor pos Perak.

Namun, beberapa perangko lokal juga diterbitkan dalam berbagai denominasi dan warna, terutama untuk keperluan resmi dan keuangan - dalam kasus perangko Inggris dan kolonial Inggris, perangko pos dan perangko dokumen/bea tidak dibedakan secara ketat.

Pada tahun 1935, otoritas Inggris menerbitkan seri baru untuk Perak, yang menampilkan potret sultan lokal, Iskandar.

Seri perangko Perak tahun 1935 dan seterusnya menjadi sangat dicari oleh para kolektor.

Pada Januari 1942, pasukan Jepang menduduki Perak dan seluruh Malaysia. Kantor pos Inggris ditutup, dan administrasi militer Jepang mengambil alih kendali di wilayah tersebut. Jepang menandai prangko Inggris dengan cap cetak mereka sendiri (overprint) dengan karakter Jepang yang bertuliskan “Dai Nippon” (Jepang Raya) dan “Malaya”.

Selama pendudukan, sistem pos Jepang beroperasi di Malaya, tetapi infrastrukturnya rusak dan layanan pos terganggu. Prangko dan kiriman pos dari periode ini jarang ditemukan, sehingga sangat berharga bagi para filatelis.

Administrasi Inggris kembali ke wilayah tersebut pada tahun 1945, tetapi kemerdekaan Melayu sudah mulai terbentuk. Pada tahun 1948, Perak juga bergabung dengan

Persemakmuran Melayu, yang memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1957. Sejak tahun 1948, prangko kolonial Inggris juga muncul di Perak, yang pada tahun itu antara lain memperingati perkawinan perak Raja Inggris George VI.

Pada tahun 1950, masih ada seri prangko edisi lokal yang menampilkan potret sultan Perak saat itu, Yusuf Izzudin Shah, tetapi setelah itu, penerbitan prangko independen Perak pada dasarnya dihentikan, dan pada tahun 1957, Perak menjadi salah satu negara bagian dari persemakmuran Melayu yang baru dibentuk...

SUMBER YANG DIGUNAKAN

Nigel Barley, *White Rajah. A Biography of Sir James Brooke*, London, Brown Book Group, 2002.

Adrian Bethray, *From Pirates to Philately - The Adventures of Collecting Sarawak*.

https://www.google.com/search?q=Adrian+Bethray%2C+From+Pirates+to+Philately+-+The+Adventures+of+Collecting+Sarawak.&og=Adrian+Bethray%2C+From+Pirates+to+Philately+-+The+Adventures+of+Collecting+Sarawak.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzY2M2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Richard Cavendish, *Birth of Sir James Brooke*, History Today. April 2003, Vol. 53, Issue 4.

W.R. Forrester-Wood, *The Stamps and Postal History of Sarawak*, Brighton, The Sarawak Specialists' Society, 1957.

G. E. Hansford-L.A. Noble, *Sarawak and Her Stamp. An Analytical Survey of all Issues from 1869 to 1934*, Isle of Wight, The Times Press, 1935.

Virginia Matheson Hooker, *A Short History of Malaysia: Linking East and West*, London, Allen & Unwin, 2003.

R. H. D. Lockhart, A Study of the Stamps of Sarawak, London, Offices of Stamp Collecting journal, 1920.

James Mackay, *Bélyegek és bélyeggyűjtés*, Budapest, Kossuth Kiadó, 2008.

Fred. J. Melville, *The Postage Stamps of Sarawak with a History of the Post Office from 1869-1906*, London, Nissen, 1907.

Anthony Millner, *The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and the Expansion of the Public Sphere*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Bertram W.H. Poole, *Sarawak, A Complete History of its Postage Stamps*, London, D. Field, 1906.

Edward W. Proud, *The Postal History of British Borneo*, Proud-Bailey, East Sussex, 1987.

Edward W. Proud, *The Postal History of Malaya Vol. 1 Straits Settlements*, Proud-Bailey, East Sussex, 2000.

Edward W. Proud, *The Postal History of Malaya Vol. 2 Federated Malay States*, Proud-Bailey, East Sussex, 2000.

Edward W. Proud, *The Postal History of Malaya Vol. 2 Unfederated Malay States (Johore,*

Kedah, Kelantan, Perlis and Trengganu), Proud-Bailey, East Sussex, 2000.

Cassandra Pybus, *The White Rajahs of Sarawak: Dynastic Intrigue and the Forgotten Canadian Heir*, Vancouver, Douglas & McIntyre, 1996.

Robert Reece, *The Name of Brooke. The End of White Rajah Rule in Sarawak*, Sarawak Literary Society, 1993.

Robert Reece, *Masa Japan. Sarawak under the Japanese, 1941-1945*, Sarawak Literary Society, 1998.

Robert Reece, *The White Rajahs of Sarawak. A Borneo Dynasty*, London, Archipelago Press, 2004.

Mike Thomson, *The Stabbed Governor of Sarawak*.

<https://www.bbc.com/news/magazine-17299633>

Barbara Watson Andaya–Leonard Andaya, *A History of Malaysia*, Honolulu, University of Hawaii Press, 2001.

Neville Watterson, *Sarawak, the De La Rue Story*, London, Brock Publications, 2000.

James Brooke – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Brooke

Charles Brooke - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Brooke,_Rajah_of_Sarawak

Anthony Brooke - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Brooke

British Malaya - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Malaya

Postage stamps and postal history of Malaysia
- Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamps_and_postal_history_of_Malaysia

Stamp Issuing Entities Of The World.

<https://www.linns.com/insights/stamp-issuing-entities-of-the-world.html>

Stanley Gibbons Commonwealth Stamp Catalogue: Brunei, Malaysia & Singapore, 5th Edition, London, Stanley Gibbons, 2018.

**PERAK MALAYSIA
NEGARA OTONOM
PERANGKAT POS
TERBITAN
BERURUTAN
1878–1941**



1878
Michel MY-PK 1

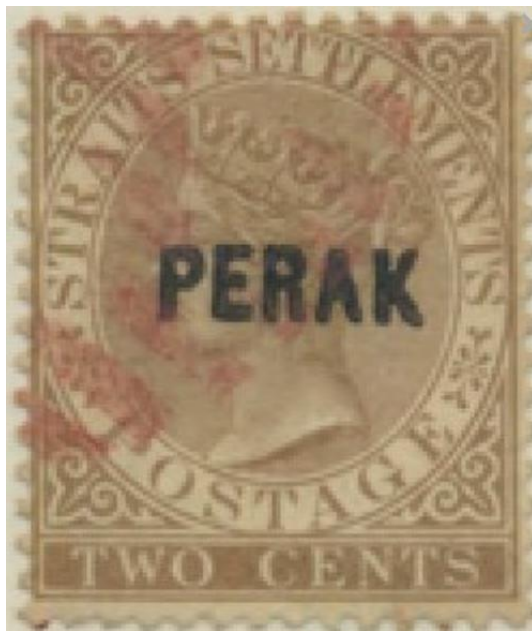


1880

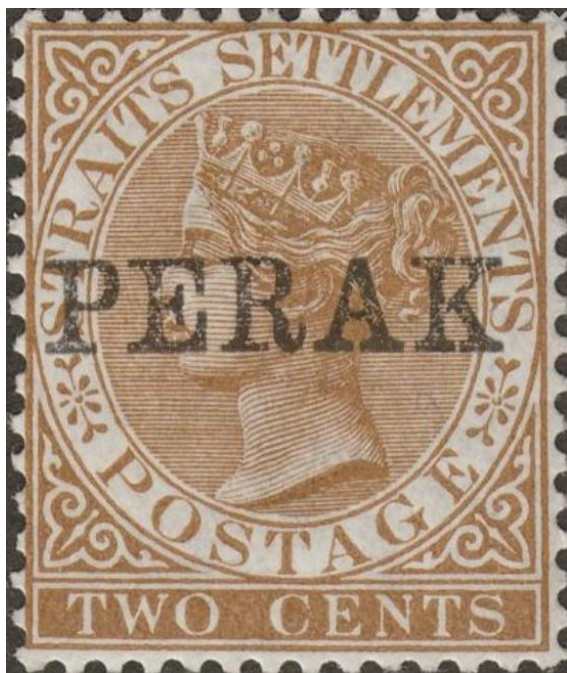
Stanley Gibbons MY-PK 1



1880
Stanley Gibbons MY-PK 3

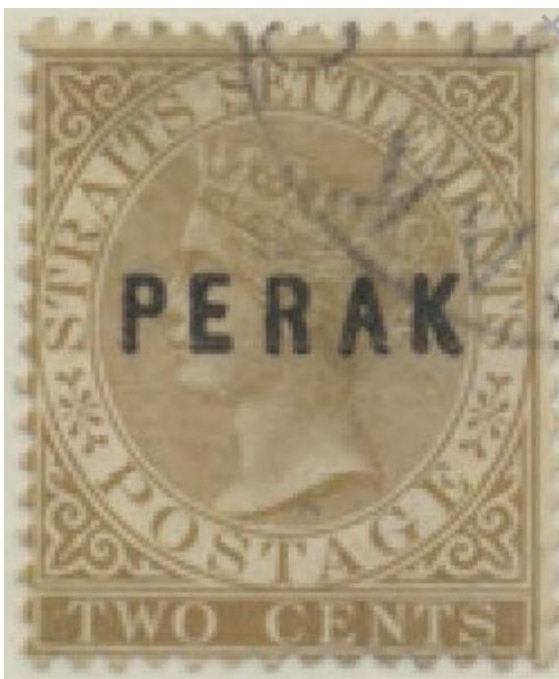


1880
Stanley Gibbons MY-PK 4



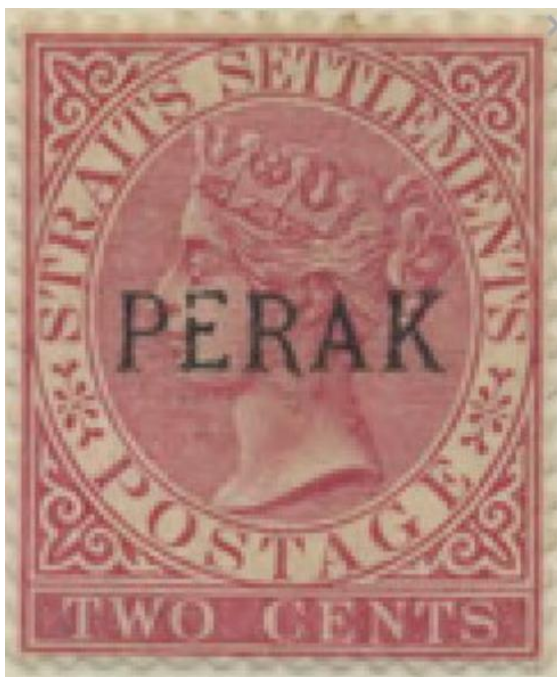
1884

Michel MY-PK 2



1884

Michel MY-PK 3X



1886

Michel MY-PK 4VI



1886
Michel MY-PK 4VII



1886
Michel MY-PK 6



1886
Michel MY-PK 8I



1886
Michel MY-PK 91



1887

Michel MY-PK 7a



1887
Michel MY-PK 7b



1887
Michel MY-PK 8II



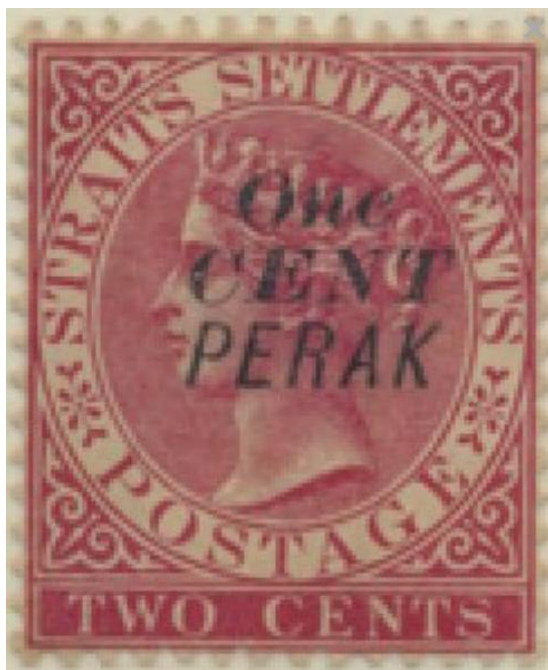
1887

Stanley Gibbons MY-PK 32



1887

Stanley Gibbons MY-PK 33



1889
Michel MY-PK 911



1889
Michel MY-PK 9III



1889

Michel MY-PK 9IV



1889
Michel MY-PK 9V



1889

Michel MY-PK 9VI



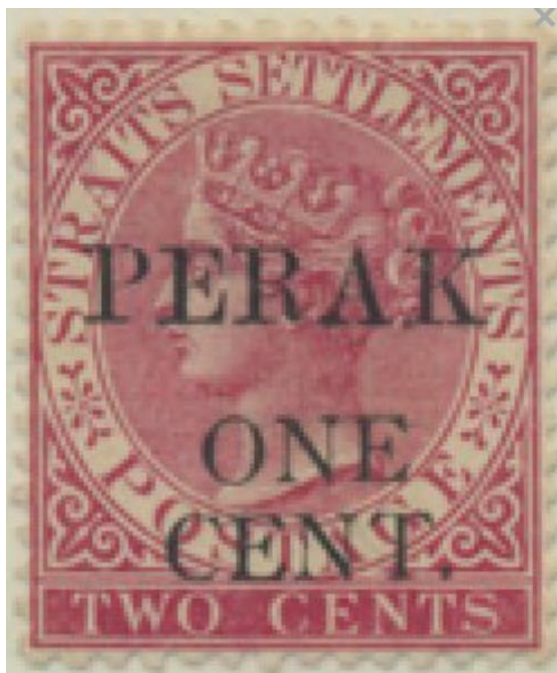
1889

Michel MY-PK 9VII



1889

Michel MY-PK 9VIII

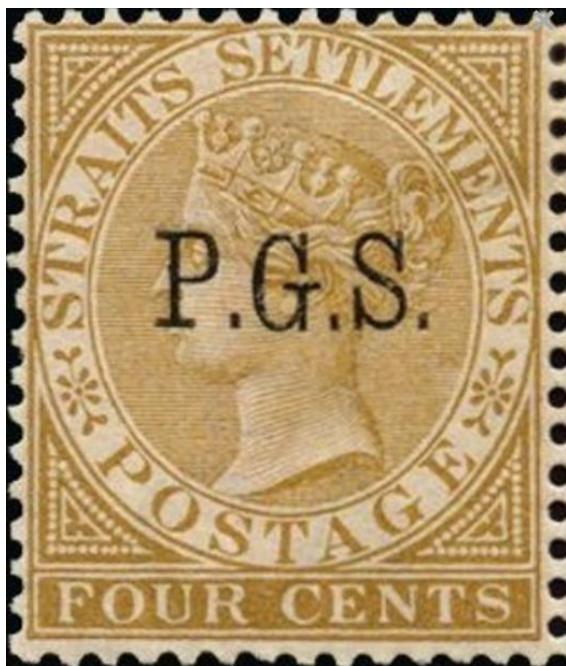


1889
Michel MY-PK 10II



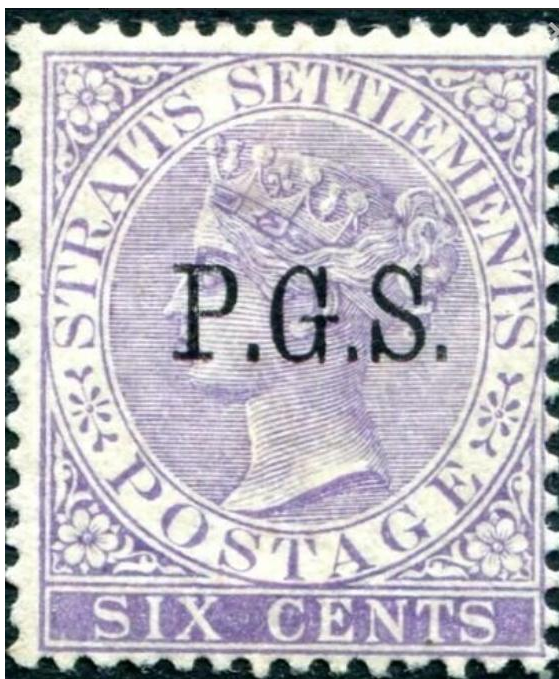
1889

Michel MY-PK D1



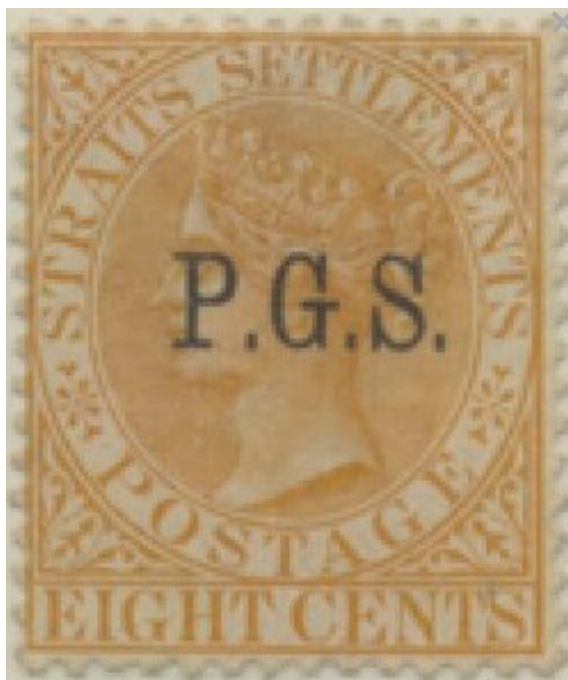
1889

Michel MY-PK D2



1889

Michel MY-PK D3



1889

Michel MY-PK D4



1889
Michel MY-PK D5



1889

Michel MY-PK D6



1889

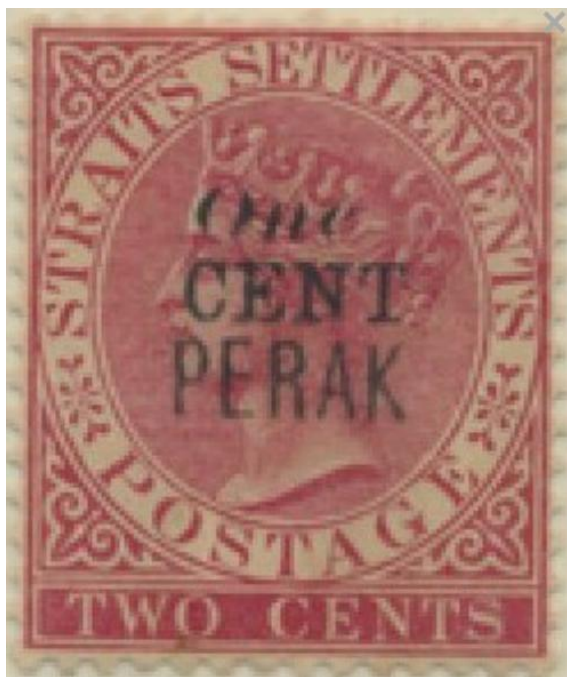
Michel MY-PK D7



1889
Michel MY-PK D8



1889
Michel MY-PK D9



1889

Stanley Gibbons MY-PK 35



1890
Michel MY-PK 4V



1891
Michel MY-PK 4III



1891

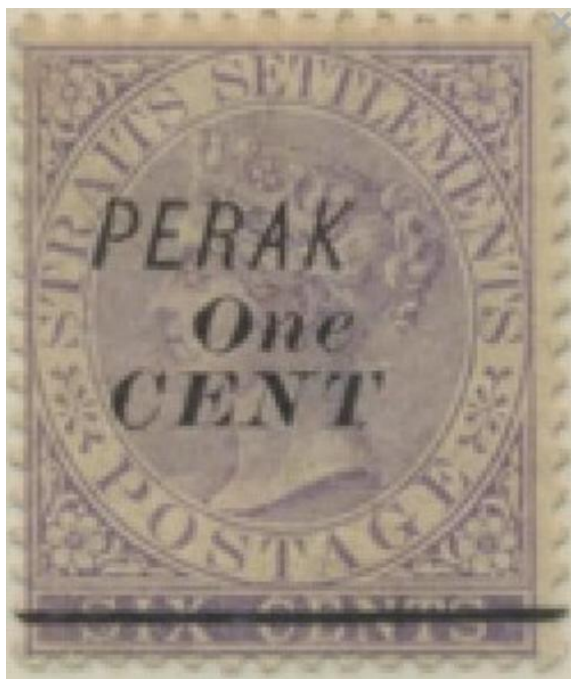
Michel MY-PK 11I



1891
Michel MY-PK 11III



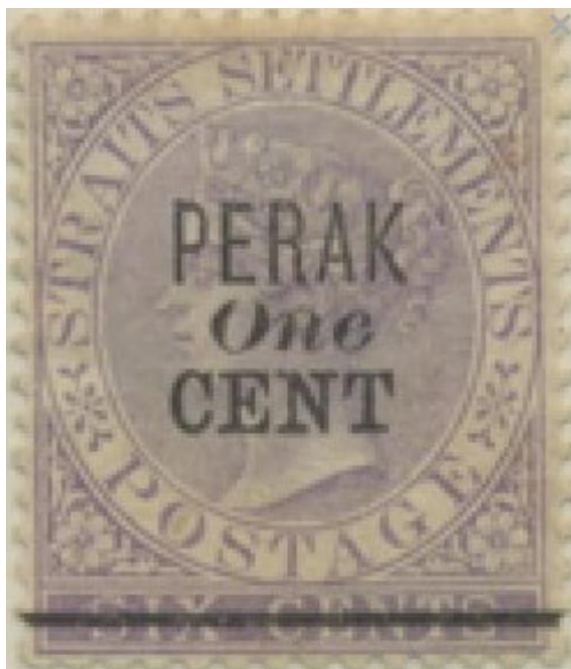
1891
Michel MY-PK 11IV



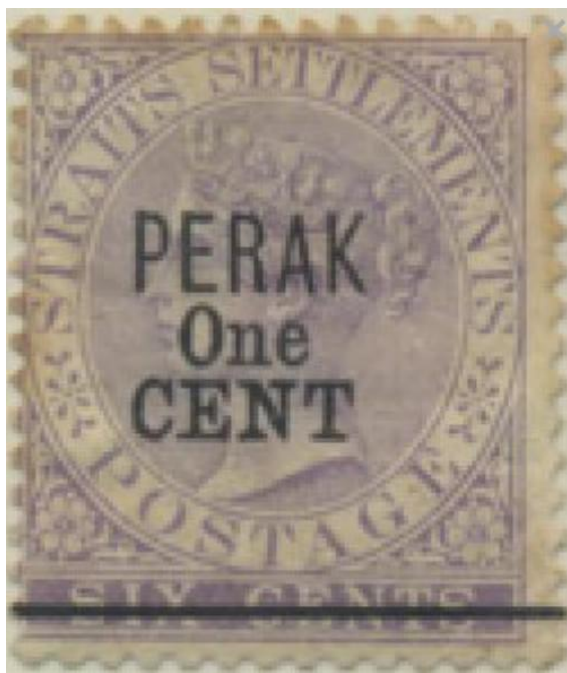
1891
Michel MY-PK 12I



1891
Michel MY-PK 12IV



1891
Michel MY-PK 12VI



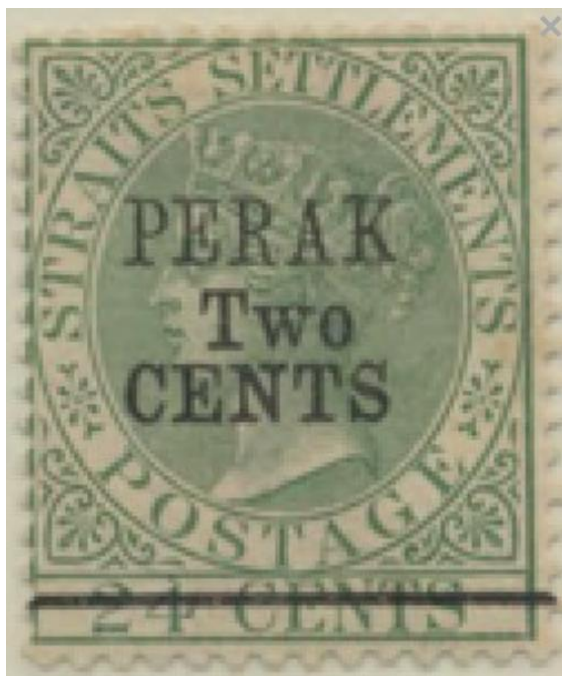
1891
Michel MY-PK 12VII



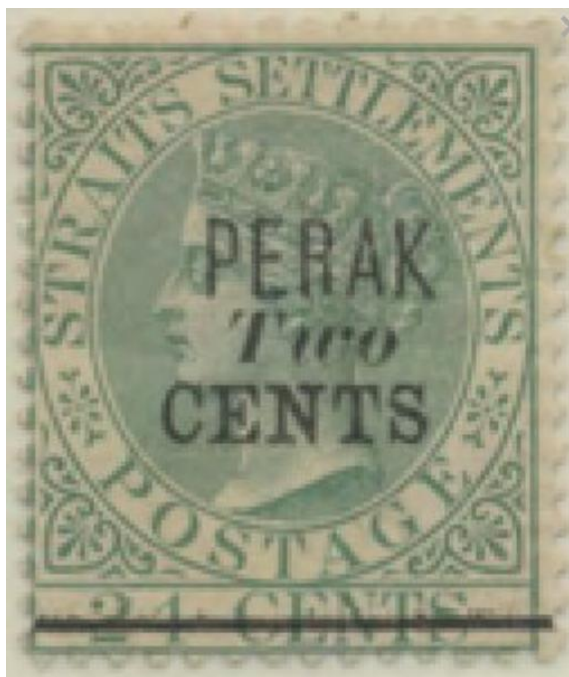
1891
Michel MY-PK 13II



1891
Michel MY-PK 13IV



1891
Michel MY-PK 13V



1891
Michel MY-PK 13VI



1891
Michel MY-PK 13VII



1892
Michel MY-PK 14



1892
Michel MY-PK 15



1892
Michel MY-PK 16



1894
Michel MY-PK D10



1895
Michel MY-PK 16



1895
Michel MY-PK 18



1895
Michel MY-PK 19



1895
Michel MY-PK 20



1895
Michel MY-PK 21



1895
Michel MY-PK 23



1895
Michel MY-PK 24



1895
Michel MY-PK 25



1895
Michel MY-PK 27



1896
Michel MY-PK 29



1896
Michel MY-PK 30



1896
Michel MY-PK 32



1897
Michel MY-PK 26



1897
Michel MY-PK D11



1898
Michel MY-PK 28



1898
Michel MY-PK 31



1899
Michel MY-PK 22



1899
Michel MY-PK 33



1900
Michel MY-PK 34



1900
Michel MY-PK 35



1900
Michel MY-PK 36



1900
Michel MY-PK 37



1900
Michel MY-PK 38



1900
Michel MY-PK 39



1900
Michel MY-PK 40



1935
Michel MY-PK 43



1935
Michel MY-PK 44



1935
Michel MY-PK 46



1935
Michel MY-PK 51



1936
Michel MY-PK 45



1938
Michel MY-PK 63



1938
Michel MY-PK 65



1938
Michel MY-PK 66



1938
Michel MY-PK 69



1938
Michel MY-PK 70



1938
Michel MY-PK 71



1939
Michel MY-PK 56



1939
Michel MY-PK 57



1939
Michel MY-PK 60



1939
Michel MY-PK 61



1939
Michel MY-PK 62



1939
Michel MY-PK 68



1940
Michel MY-PK 72



1940
Michel MY-PK 73



1941
Michel MY-PK 58



1941
Michel MY-PK 59



1941
Michel MY-PK 64



1941
Michel MY-PK 67



1941
Michel MY-PK 74

Collectively known as **BRITISH MALAYA**

NEGERI SEMBILAN
PAHANG
PERAK
SELANGOR

JOHOR
KEDAH
KELANTAN
PERLIS
TERENGGANU

1824
Holland ceded
MALACCA to
British East India

1790
Kedah ceded
PENANG to
British East India

2 August 1824
SINGAPORE
became a
British Colony

1826
STRAITS SETTLEMENTS
established under the control
of the British East India Company

1 April 1867
STRAITS SETTLEMENTS became a Crown Colony

1895
Federated
Malay States

Unfederated
Malay States

30 October 1906
Labuan joined the STRAITS SETTLEMENTS

1 April 1946
Federated Malay States, Unfederated Malay States,
Malacca and Penang formed the **MALAYAN UNION**

31 January 1948
Reformed as the **FEDERATION OF MALAYA**
(The Malay States became
British Protectorates) (Malacca and Penang
remained British Colonies)

31 August 1957
The **FEDERATION OF MALAYA**
granted independence within the British Commonwealth



16 September 1963
The Federation of Malaya, Singapore, British North Borneo
(as the State of Sabah) and Sarawak merge to form **MALAYSIA**

9 August 1965
SINGAPORE
expelled from
Malaysia

Collectively known as **BRITISH BORNEO**

1846
Brunei ceded
LABUAN to
Britain

1882
SABAH governed
by British North
Borneo Company

1841
Brunei ceded
SARAWAK to the White
Rajah Dynasty
of Sarawak

1848
LABUAN
became a
Crown Colony

1888
Sabah became British
NORTH BORNEO
protectorate

1 January 1890
Labuan annexed to **NORTH BORNEO**

1 April 1946
Labuan annexed to Singapore, which be-
came the **CROWN COLONY OF SINGAPORE**

3 June 1959
SINGAPORE
granted
self-governance

15 July 1946
Labuan annexed to North Borneo,
which became the **CROWN COLONY
OF BRITISH NORTH BORNEO**

1 July 1946
The Rajah ceded
SARAWAK to the British Crown

August 1963
SINGAPORE
declared
independence

31 August 1963
BRITISH NORTH BORNEO
granted self-governance

22 July 1963
SARAWAK
granted
self-governance

